

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan faktor yang berperan sangat penting dalam kehidupan umat manusia dan ekonomi juga sangat menentukan pola hidup, corak dan karakter suatu masyarakat. Perkembangan ekonomi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi saat ini. (Kasmir, 2011: hlm. 33)

Pemerintah mempunyai peran utama dalam upaya mensejahterakan warga negaranya dengan mengatur dan mengelola perekonomian suatu negara. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat dinilai dari seberapa sejahtera warga negaranya termasuk dari segi ekonomi. Indonesia masih dikategorikan negara berkembang karena permasalahan kesejahteraan yang dihadapi dalam perekonomian warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negaranya negara atau pemerintah melakukan berbagai macam cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan yang telah dipilih, ditempuh dan dilakukan oleh negara demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi warga negaranya. Kesejahteraan ini yang menjadi perhatian utama pemimpin bagi suatu negara dan harus serius demi kemajuan sebuah negara untuk mewujudkan

ketertiban, keadilan dan kehidupan yang lebih baik serta layak yang disebut kesejahteraan. (Soetomo, 2014, hal. 12)

Permasalahan yang di hadapi pemerintah sekarang dalam kesejahteraan warga negaranya atau masyarakatnya adalah dari sistem distribusi yang masih kurang efektif dan belum tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi warga negaranya. Sektor distribusi ini yang masih belum merata dilakukan keseluruhan masyarakat yang membutuhkan.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Mengenai distribusi menjadi sebuah kajian menarik dalam ekonomi Islam karena distribusi mempunyai kaitan yang sangat penting dalam aspek ekonomi sosial hingga politik sehingga menjadi perhatian utama bagi para ekonom Islam dan konvensional sampai sekarang dalam menyelesaikan permasalahan distribusi ini. (Sudarsono, 2002, hal. 216)

Islam mengajarkan manusia dalam menjalani hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat dengan tuntunan wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan hidup di dunia merupakan cita-cita seluruh umat dengan cara memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada sekarang secara maksimal dalam ruang lingkup Islam yang baik lagi benar. Al-Qur'an memberikan sebuah tuntunan bagi umat manusia dalam perekonomian

yang berlandaskan Islam. Salah satu Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang distribusi dalam perekonomian adalah tertera pada Firman Allah SWT :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.QS. al-Hasyr /59:7*

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa harta harus di distribusikan demi tercapainya kesejahteraan sehingga harta tidak beredar di antara segelintir orang saja. Dari ayat tersebut ekonomi Islam menganjurkan untuk melakukan distribusi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat umum. Distribusi yang adil dan merata akan tercapainya sebuah kesejahteraan yang merata pula, namun apabila harta yang tidak adil dan merata akan berdampak pada masyarakat luas dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin karena hanya distribusi hanya bisa di nikmati segelintir orang saja. Dengan demikian pola distribusi yang harus menjadi prioritas utama adalah berdasarkan *Need Assessment* (Analisis Kebutuhan). Hal ini yang melatarbelakangi pemikir-pemikir muslim untuk menyelesaikan tentang distribusi yang adil demi kesejahteraan umat dengan Ekonomi Islam. (Amalia, 2008, hal. 1)

Ekonomi Islam mengajarkan konsep tolong-menolong demi hubungan antar individu lebih efektif dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya

hubungan antar individu ini akan lebih efektif apabila dilakukan dengan konsep tolong-menolong demi memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan berdasarkan hasrat ingin menguasai atau menimbun barang yang seharusnya didistribusikan.

Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. QS. al-Maidah/5:2

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan untuk kelangsungan hidup yang layak dengan keadilan demi tercapainya sebuah kesejahteraan hidup bagi antar umat. (Indonesia, 1990, hal. 157)

Konsep tolong-menolong inilah yang di dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berdagang atau berbisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah keuntungan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen dalam rangka memperbaiki hidup mereka. (Umar, 2005, hal. 5)

Berdasarkan uraian diatas mengenai kesejahteraan dan distribusi, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap distribusi demi sebuah kesejahteraan masyarakat dalam pendistribusian barang, dimana bisnis tidak terlepas dari yang namanya produsen dan konsumen termasuk pendistribusian yang menjadi peran utama dalam menyalurkan barang baik dari Industri ataupun

agen dalam bisnis. Oleh sebab itu, seorang pembisnis harus pandai dalam melakukan pendistribusian barang demi memenuhi kebutuhan orang banyak dengan berbagai macam cara dan sistem.

Manajemen distribusi adalah proses perencanaan dalam menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen melalui perusahaan langsung atau perantara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Pada umumnya perusahaan seharusnya melakukan distribusi secara langsung tanpa perantara untuk memenuhi kebutuhan orang banyak demi tercapainya distribusi yang merata. Distribusi tanpa perantara juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan distribusinya juga bisa diawasi langsung oleh perusahaan. Sedangkan distribusi melalui perantara akan menambah biaya distribusi barang dan jasa, sehingga akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa yang di distribusikan. (Westriningsih, 2018, hal. 3)

Saluran distribusi sekarang menjadi lebih mudah dengan cara melakukan kerjasama antara perusahaan dengan perantara demi mementingkan kebutuhan orang banyak. Salah satu saluran distribusi yang melakukan sistem kerjasama antara perusahaan dan perantara/agen adalah perusahaan PT. Pertamina (Persero) dalam mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi (LPG).

Pada (Perpres 104 tahun 2007) menyatakan bahwa badan usaha yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian Tabung Gas Lpg 3kg untuk rumah tangga dan usaha mikro masyarakat di Indonesia adalah PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) di percaya mengelola minyak dan gas bumi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam sampai mendistribusikannya kemasyarakat.

Kegiatan distribusi dari PT. Pertamina (Persero) masih ada terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu produknya yang masih ada kendala dalam distribusi adalah gas bumi (Gas Lpg 3kg). Dalam mengatasi permasalahan distribusi ini PT. Pertamina (Persero) dan Pemerintah melakukan berbagai macam cara seperti membuat kebijakan dari undang-undang hingga menjalin kerjasama langsung dengan masyarakat sebagai Agen atau perantara untuk menyalurkan distribusi Gas Lpg 3kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agen atau perantara yang dipercaya untuk mendistribusikan Gas Lpg 3kg juga menggunakan berbagai macam cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti menggunakan konsep komputerisasi, media *Online*, dan barcode. Namun, cara dan metode tersebut masih belum efektif dalam mengatasi kelangkaan Gas Lpg 3kg karena setiap wilayah memiliki peraturan daerah yang berbeda dan jangkauan yang berbeda. Di Banjarmasin sendiri sering mengalami kelangkaan tabung Gas Lpg 3kg, padahal jumlah Gas Lpg yang masuk sudah diperhitungkan Pemkot Banjarmasin untuk mencukupi kebutuhan masyarakat demi menghindari kelangkaan dan perbedaan harga.

Pemkot Banjarmasin tidak tinggal diam melihat kelangkaan yang sering terjadi di masyarakat, dalam distribusi gas ini pemerintah menerbitkan 37 kartu untuk hak menerima Gas Lpg yang dikhususkan untuk masyarakat Banjarmasin dengan pembagian sistem wilayah. Kartu ini diharap mampu mengatasi kelangkaan yang terjadi atau paling tidak mengurangi. Namun, kartu tersebut masih belum tepat sasaran yang layak mendapatkan kartu tersebut. Akibatnya masih ada saja oknum yang menyalahgunakan fungsi dari kartu ini sehingga kartu

kendali tersebut masih terdapat kendala di Banjarmasin. Akan tetapi, tidak semua wilayah di Banjarmasin yang mengalami kelangkaan dalam penyediaan Gas Lpg. Karena ada pangkalan Gas Lpg di Banjarmasin yang menggunakan sistem kartu kendali yang jelas dengan konsep wilayah dalam mendistribusikan gas. Adapun pangkalan gas tersebut adalah Pangkalan Hanifah.

Pangkalan Hanifah adalah salah satu pangkalan Gas Lpg di Banjarmasin Tengah yang menggunakan sistem distribusi Gas Lpg berbeda dari pangkalan lain dengan sistem kartu kendali dengan konsep wilayah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar atau wilayah distribusi pangkalan tersebut. Beberapa masyarakat sekitar yang menggunakan kartu kendali ini merasa terbantu untuk mendapatkan distribusi Gas Lpg 3kg di Banjarmasin Tengah dengan harga yang lebih murah yaitu Rp. 17.500, jauh lebih murah dari pada harga Gas Lpg di eceran yang harganya Rp. 35.000 bahkan ada yang menjual Rp.40.000. Selain itu, bagi masyarakat sekitar yang mendapatkan kartu penerima Gas Lpg 3kg dari Pemkot Banjarmasin juga bisa menggunakan kartu tersebut di pangkalan ini dan mendapatkan pelayanan yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pangkalan Gas Lpg tersebut guna memahami dan mengkaji sistem distribusi tersebut yang dilakukan Pangkalan Hanifah di Jl. Sungai Baru No. 21 Kecamatan Banjarmasin Tengah. Penelitian ini akan penulis jadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penggunaan Kartu Kendali dengan Sistem Konsep Wilayah dalam Distribusi Gas Lpg di Kecamatan Banjarmasin Tengah (Studi kasus Pangkalan Hanifah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengkaji beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana sistem distribusi kartu kendali dengan konsep wilayah dalam kegiatan distribusi Gas Lpg di Banjarmasin Tengah (Studi kasus Pangkalan Hanifah) ?
2. Apa saja kendala dalam kegiatan distribusi kartu kendali dengan konsep wilayah untuk mendistribusikan Gas Lpg di Banjarmasin Tengah (Studi kasus Pangkalan Hanifah) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem distribusi kartu kendali dengan konsep wilayah dalam kegiatan distribusi Gas Lpg di Banjarmasin Tengah (Studi kasus Pangkalan Hanifah)
2. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam kegiatan distribusi kartu kendali dengan konsep wilayah untuk mendistribusikan Gas Lpg di Banjarmasin Tengah (Studi kasus Pangkalan Hanifah)

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini untuk memberi manfaat antara lain :

1. Secara teoristis, penelitian ini menjadi bahan kajian untuk menambah inovasi baru dalam distribusi dalam ruang lingkup ekonomi islam untuk kesejahteraan masyarakat luas dan etika seorang pembisnis.



2. Secara praktis, penelitian ini menjadi masukan, evaluasi, motivasi dan mengembangkan pengelolaan dalam distribusi Gas Lpg di Banjarmasin.
3. Secara umum, sebagai bahan informasi untuk peneliti berikutnya dari aspek yang berbeda dan lebih mendalami lagi penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dalam khazanah keislaman dalam bidang ekonomi dan bagi perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi atau istilah untuk membatasi terhadap judul tersebut :

1. Distribusi adalah suatu sistem pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen dalam menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. (Kotler, 2001, hal. 7) Adapun yang dimaksud distribusi dalam penelitian ini adalah kegiatan distribusi dari Pangkalan Hanifah dalam menyalurkan Gas Lpg kepada konsumen.
2. Gas Lpg adalah berupa gas hidrokarbon yang melalui proses distilasi dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan yang selanjutnya diisikan ke dalam tabung dengan ukuran tertentu. (Peraturan Presiden, 2007) adapun yang dimaksud Gas Lpg dalam penelitian ini adalah tabung Gas Lpg ukuran tiga kilogram.

3. Kartu kendali menurut (Peraturan Menteri, 2009) adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna Lpg Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian Lpg Tertentu. Adapun yang dimaksud kartu kendali dalam penelitian ini adalah kartu yang digunakan dalam mendistribusikan Gas Lpg kepada masyarakat dengan media kartu dari Pangkalan Hanifah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan dalam penelitian yang di angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lupian Haryadi NIM 1316611341 yang berjudul “Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Inti dari penelitian ini menghasilkan temuan masih ada pangkalan yang menjalin kerjasama dengan pengecer dan lebih mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga atau usaha mikro sekitar. Sehingga pengecer menjual gas dengan harga di atas HET kepada masyarakat, menyalurkan ke area lain dan melakukan penimbunan yang menimbulkan kelangkaan gas. Perilaku atau etika seorang pembisnis seperti itu dilarang dalam ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini membahas tentang distribusi Gas Lpg 3kg. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini membahas tentang media distribusi Gas Lpg 3kg menggunakan Kartu Kendali dengan sistem Konsep wilayah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triola Ramadan NIM 1210842014 yang berjudul “Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi Di Kota

Padang”. Inti dari penelitian ini adalah pengawasan dalam kegiatan distribusi Gas Lpg 3kg di Kota Padang masih tidak efektif, karena masih ditemukan penjual yang tidak memiliki Surat Izin Niaga dan sarana distribusi yang menyebabkan pengecer bebas menjual Gas Lpg 3kg dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Persamaan penelitian ini membahas tentang distribusi Gas Lpg 3kg. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini membahas tentang media distribusi Gas Lpg 3kg menggunakan Kartu Kendali dengan sistem Konsep wilayah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rot Jeniansyah NIM 1401150245 yang berjudul “Manajemen Distribusi Penjualan Ikan Jelawat di Pasar Ikan Mentaya Sampit dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Inti dari penelitian ini adalah manajemen distribusi ikan jelawat di pasar Mentaya melalui tahapan-tahapan yang jelas seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Manajemen distribusi yang dilakukan terlihat sederhana, namun sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari riba, transaksi yang jelas sampai menghindari penimbunan ikan dengan manajemen pengendalian yang baik. Persamaan penelitian ini membahas tentang distribusi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini membahas tentang media distribusi Gas Lpg 3kg menggunakan Kartu Kendali dengan sistem Konsep wilayah.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian terdahulu di atas sudah membahas tentang distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, meskipun sama berfokus dan menitikberatkan tentang pendistribusian Gas Lpg. Namun terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti dengan penelitian di atas, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pada sistem distribusi Gas

Lpg dengan konsep wilayah. Sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti diatas, baik dari objek penelitian maupun subyek penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca untuk memahami dari tulisan ini, maka penulis perlu menggunakan sistematika dalam menyusun penelitian ini dalam beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah judul dalam penelitian ini, barulah setelah itu penulis menjadikan permasalahan tersebut menjadi suatu rumusan masalah dalam rangka untuk memperoleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan menjadi batasan didalam penelitian ini untuk terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II Landasan Teori, yang menguraikan teori-teori umum dari syariah dalam pelaksanaan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi Gas Lpg dengan menggunakan media kartu kendali dengan konsep wilayah di Jl. Sungai Baru No. 21 Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang kemudian dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman analisis data.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan. Sistematika ini akan mempermudah dalam penelitian agar tepat sasaran dalam melakukan pengumpulan data yang efektif dan akurat, sehingga data yang didapat jelas dan valid.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, penyajian data terdiri dari gambaran umum usaha Pangkalan Hanifah dan hasil wawancara. Analisis data dari jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari masyarakat sekitar terhadap distribusi Gas Lpg dengan menggunakan kartu kendali, analisis sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian ini yang dijelaskan secara singkat dan padat.